

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Supardi¹, Masayu Adiah²

Email:pardi297474@gmail.com

¹ FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

² FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Walikota Palembang telah mengeluarkan Instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan penanganan penularan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam memelihara ketentraman masyarakat dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Sat Pol PP Kota Palembang dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek dan mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Sat Pol PP kota Palembang, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan COVID-19, antara lain faktor internal meliputi Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang dalam mengawasi, mengendalikan, mencegah penyebaran COVID-19 selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal meliputi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Peran, Polisi Pamong Praja, Covid 19.

ABSTRACT

The Palembang City Government, in this case the Mayor of Palembang, has issued an Instruction for the Mayor of Palembang No. 1 of 2020 on April 21, 2020 which instructs to improve control, prevention, and handling of the transmission of Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) in Palembang City. This study aims to find out how the role of the Palembang City Civil Service Police Unit in maintaining public peace in dealing with the spread of COVID-19 in Indonesia is carried out by the Civil Service Police Unit. The results of the study indicate that the Palembang City Civil Service Police Unit has tried to overcome the existing problems, obstacles have been found in the field, such as the presence of people who do not use masks and continue to huddle together on the grounds of family members. However, this can be circumvented by the Palembang City Sat Pol PP by arranging patrol schedules so that they routinely check and supervise community activities with the firmness of the Palembang City Sat Pol PP leadership, commitment to support infrastructure facilities to always urge the public both through print and online media. . This is influenced by factors that affect the success of the supervision, control and prevention of COVID-19, including internal factors including the Palembang City Civil Service Police Unit in supervising, controlling, preventing the spread of COVID-19, always prioritizing coordination and synchronization with cross-sectors. While external factors include the interests of the community itself.

Keywords: Role, Civil Service Police, Covid 19.

¹ Dosen FISIP Universitas Tamansiswa Palembang.

² Dosen FISIP Universitas Tamansiswa Palembang.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Awal tahun 2020 dunia digegerkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit dengan gejala parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan SarsCoV-2.³

Saat ini negara di dunia termasuk di Indonesia sedang menghadapi masalah bersama yaitu wabah covid-19, dimana virus ini mengganggu sektor ekonomi, sektor kerja Lembaga pemerintahan dan lain-lain. Semua masyarakat di muka bumi ini dipaksa untuk selalu hati-hati bahkan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah.

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona (Covid-19). Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal sebagai COVID-19 telah memberi dampak keresahan bagi masyarakat. Virus ini lebih kuat bertahan hidup di daerah yang memiliki suhu rendah dan kering, namun demikian virus ini juga tetap

mewabah pada negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi dan diketahui lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk yang berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit tertentu.⁴

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada awal Maret 2020 dan terus mengalami penambahan jumlah pasien sampai dengan periode data Oktober 2020. Kasus Covid-19 yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Terkait hal tersebut Pemerintah kota Palembang dalam hal ini Walikota Palembang telah mengeluarkan Instruksi Walikota Palembang No. 1 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan penanganan penularan Corona virus diseases 2019 (Covid 19) di Kota Palembang.⁵ tertuang dalam poin ke 9 mengintruksikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegaskan kembali kepada masyarakat agar menjaga jarak (*physical distancing*) dalam berjalan, berkendara, dan tidak ada kerumunan masyarakat, dan penggunaan masker. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan

⁴<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

⁵ Raden Wijaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung: Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020: 69-82, hlm.70.

³ Osie Listina, "Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal", *Jurnal Kesehatan*, Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi, 2020, hlm. 3.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya pada Provinsi Sumsel, maka perlu adanya suatu kegiatan yang sifatnya memberi pengertian kepada masyarakat agar melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyebaran COVID-19.⁶

Dengan adanya Instruksi yang telah diberikan oleh Walikota Palembang, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI/Polri sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian orang yang keluar masuk kota Palembang dan yang beraktifitas dikota Palembang secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan COVID-19. Usaha yang dilakukan bersama TNI/Polri melakukan pengecekan suhu, dan identitas pengendara disetiap Pos yang telah ditentukan, melakukan sidak atau pengecekan ke tempat yang dianggap rawan keramaian, melakukan Patroli kepada pedagang yang tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan

penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19?

C. Pembahasan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai bagian gugus tugas COVID-19 memiliki peran yang cukup penting dalam mengawasi dan Mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan ketidakteraturan aktifitas masyarakat, maka Pemerintah Kota Palembang telah mengintruksikan melalui Instruksi Walikota No. 1 tahun 2020 tentang peningkatan Pengendalian, pencegahan dan penanganan Penularan corona *Virus disease* (COVID-19) di Kota Palembang, dimana dinyatakan bahwa dimana setiap sudut kota Palembang yang dianggap titik rawan diadakan Pos pengecekan dan pos siaga COVID-19.⁷

Satpol PP beserta Satgas COVID-19 berwenang untuk mengawasi aktifitas masyarakat bahkan memberikan tindakan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar sesuai Pasal 27 sampai Pasal 36 pada yang tertuang pada Bab IX Perwali Kota Palembang No 14 tahun 2020 yaitu berupa sanksi teguran administratif, penutupan sementara, dan denda maksimal Rp.10.000.000.

Dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan

⁶ *Ibid*, hlm.71.

⁷ Raden Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 72.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

pengawasan aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di kota Palembang. Satpol PP memiliki jadwal pengawasan patroli 3x sehari yaitu pada saat pagi, siang, dan malam hari yang mana langsung menegur masyarakat yang tidak mematuhi peraturan PSBB bahkan menggunakan pengeras suara dan juga media sosial cetak dan *Online* seperti facebook dan instagram.

Jumlah toko, pedagang dan masyarakat sama sekali tidak ada namun satpol PP selalu berjaga saling bergantian piket yang sudah diatur, aktifitas ditempat ini seakan kota mati selama masa PSBB guna menekan penyebaran virus COVID-19 di zona merah. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu Bapak GA Putra Jaya yang menyatakan bahwa “dimana ada tempat keramaian kami disana akan gencar lakukan razia, sidak dan pembubaran keramaian dan mengamankan masyarakat yang tidak dapat menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19” tegas beliau. Kasatpol PP Kota Palembang melalui Kasi Ops juga telah mengatur piket pos anggotanya yang setiap harinya berganti dan juga membentuk tim Satgas Sidak rutin Satpol PP yang mana dilakukan setiap 3 x selama 1 hari mereka gencar melakukan razia keramaian terutama di pasar, terminal, dan toko-toko yang masih berjualan selama masa PSBB.⁸

Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah

satu pedagang yang bernama Bapak Burhanuddin, yang berjualan pakaian mengakui bahwa dirinya pernah ditegur dan diarahkan segera menutup tokonya, “saya sudah pernah ditegur oleh anggota Satpol PP, mereka seringkali Patroli dan sidak hampir 3 sehari mereka datang untuk membubarkan meskipun saya merasa keberatan Karena hanya ini mata pencarian saya namun tetap saya patuhi untuk kepentingan kesehatan semua orang”.⁹

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19

a. Faktor Pendukung

1. Peraturan Mengenai Protokol Kesehatan

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Dalam hal kinerja Satpol PP Kota Palembang, faktor pendukung yaitu kebijakan itu sendiri yang mendukung peran Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan prokes.

Menurut Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H mengatakan bahwa:¹⁰

“Kebijakan dalam hal ini mengenai Prokes sangat dibutuhkan karena itu menjadi kekuatan hukum bagi kami untuk

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu Bapak GA Putra Jaya, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.15 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.20 WIB.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

melaksanakan kebijakan tersebut, biar tidak terjadi salah paham, maka kebijakan tersebut menjadi faktor pendukung dalam kinerja organisasi sat pol PP Kota Palembang tersebut karena memuat aturan yang bisa jadi pedoman para personil dalam bekerja khususnya penegakan prokes”.

2. Kualitas Personil

Suatu organisasi atau lembaga pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir yang nantinya akan menentukan kemampuan manusia.

Menurut Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H mengatakan bahwa:¹¹

“Jumlah personil Sat Pol PP jika dikatakan lebih tidak juga, namun masih perlu ada

penambahan, akan tetapi secara kualitas sangat baik, salah satu faktor penting dari pada sumber daya yang berkualitas adalah kecepatan personil dalam bekerja dan kemampuan mereka dalam bekerjasama atau kerja TIM, hal ini tidak lepas dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang pernah mereka tempuh”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya personil mulai dari kualifikasi pendidikan akademik yang baik dan pelatihan-pelatihan yang diikuti sebelum penempatan, membuat kualitas sumber daya personil Satpol PP menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja Personil Satpol PP Kota Palembang dalam menjalankan perannya untuk penegakan protokol Kesehatan dalam situasi pandemi ini.

3. Teamwork

Teamwork bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama yang merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Untuk membentuk dan membangun *teamwork* yang solid, tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, *teamwork* yang solid akan menciptakan hasil yang maksimal dalam suatu tim tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh

¹¹ Hasil wawancara dengan Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.20 WIB.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Kasat Pol-PP Bapak Drs. G.A Putra sebagai berikut:¹²

“Kerja tim jelas, di organisasi atau lembaga manapun setiap anggota dituntut untuk bisa bekerjasama dengan baik, dalam hal apapun dan tidak bisa diragukan lagi, saling dukung dan saling menutupi kekurangan. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam penengakkan proses akan sangat membantu melancarkan pekerjaan”.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung dari pada peran Sat Pol PP Kota Palembang dalam penegakan protokol kesehatan adalah adanya kerjasama yang baik antar bagian jadi satu sama lain saling mendukung dan saling menutupi kekurangan masing-masing dan kerjasama ini juga terjalin dengan instansi lainnya.

b. Faktor Penghambat

1. Masyarakat Yang Sulit Diatur

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan

bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H mengatakan bahwa:¹³

“Kasus penertiban di tengah masyarakat dalam situasi pandemic corona, baik masyarakat biasa maupun pedagang di pasar. pedagang dari dulu memang sulit diatasi, hal ini tentu memang tidak lepas dari budaya masyarakat kita yang memang sebagian tidak bisa diberi pemahaman ataupun di ataur, penertiban PKL menjadi masalah yang berat dan setiap harinya terus bertambah dan meningkat seakan-akan sudah menjadi budaya. Nah apalagi dalam situasi dimana kondisi pandemic corona saat ini kita mau menyuruh pake masker dan yang lebih banyak aturan sangat sulit untuk merka taati”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi masyarakat kita yang sulit untuk ditertibkan akibat dari kebutuhan ekonomi di satu sisi, namun disisi lain budaya masyarakat yang sulit untuk di atur. Meskipun demikian personil sat Pol PP tetap harus menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi dan sesuai

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu Bapak GA Putra Jaya, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.15 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.20 WIB.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

dengan kebijakan prokes.

2. Jumlah Personil yang Masih

Kurang

Menurut Mathis dan Jackson (2006), sumber daya manusia merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi yang berfungsi untuk menjaga agar penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut secara efektif dan efisien.¹⁴

Berikut ini hasil wawancara dengan Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H bahwa:¹⁵

“Saat ini memang jumlah personil yang dimiliki memang masih minim dan kurang. Kenapa demikian karena memang kebutuhan personil ditengah pandemic konsentrasinya jadi terbagi. Kurangnya jumlah personil sangat mengganggu kinerja Pol PP Kota Palembang, Kami terpaksa harus membagi dan memaksimalkan jumlah personil yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sudah tergambar dengan cukup jelas, bahwa kurangnya personil menjadi salah satu penghambat kinerja

Sat Pol PP Kota Palembang dalam menjalankan perannya untuk menertibkan masyarakat dalam penegakan prokes, sudah seharusnya diseimbangkan dengan penambahan jumlah personil Sat Pol PP Kota Palembang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Dalam menerapkan strategi dari kebijakan penanganan covid dan penegakan prokes perlu di dukung oleh pegawai yang berkualitas dan dengan jumlah personil yang sudah cukup. Sangat penting peran dari Pol PP dalam penyelesaian dan penengah dan sebagai pelaksana serta penegakan prokes, yang diperlukan yaitu kreativitas dari anggota personil Pol PP, hal ini dibutuhkan dimana kondisi pro kontra berbagai sifat masyarakat yang sulit untuk dihadapi, belum lagi situasi lapangan terkadang berbeda dengan prediksi awal, jadi adanya ide dan kreativitas dari personil akan sangat membantu kinerja Sat Pol PP Kota Palembang.

b. Kebijakan mengenai Protokol Kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung dalam Peran dari Sat Pol PP Kota Palembang. Kemudian kualitas sumber daya personil yang mempunyai mulai dari kualifikasi pendidikan akademik yang baik dan pelatihan-pelatihan yang diikuti sebelum penempatan. Serta adanya kerjasama yang baik antar bagian

¹⁴ Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 73.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kabid Bina Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bapak Herison, M.H, Hari Jum'at Tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10.20 WIB.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

jadi satu sama lain saling mendukung dan saling menutupi kekurangan masing-masing dan kerjasama ini juga terjalin dengan instansi lainnya. Sedangkan Faktor Penghambat terdiri dari kondisi masyarakat yang sulit untuk ditertibkan akibat dari kebutuhan ekonomi di satu sisi, namun disisi lain budaya masyarakat yang sulit untuk di atur. Meskipun demikian personil sat Pol PP tetap harus menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi dan sesuai dengan kebijakan prokes. Kemudian kurangnya personil menjadi salah satu penghambat kinerja Sat Pol PP Kota Palembang dalam menjalankan perannya untuk menertibkan masyarakat dalam penegakan prokes, sudah seharusnya diseimbangkan dengan penambahan jumlah personil Sat Pol PP Kota Palembang.

2. Saran

1. Perlunya mengadakan patroli secara lebih intens agar kepatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan semakin besar. Hal ini mengingat angka penderita Covid-19 yang semakin bertambah setiap hari dan pandemi belum berakhir.
2. Pemerintah Kota Palenbang perlu menambah jumlah personel Satpol PP Kota Palembang agar beban kerja yang dipikul Satpol PP tidak berat dan akan optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu, 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 1997, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadari Nawawi & Martini Hadari .2004. *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas. Sebelas Maret Press.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Buku kedua.
-, 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J, 2007 . *Metode Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Osie Listina, 2020, “*Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*”, *Jurnal Kesehatan*, , Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi.
- Raden Wijaya, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bandung: *Jurnal Tatapamong 2* (1), Maret 2020: 69-82.
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Balairiung.

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagaipandemi-global>

